

MENERAPKAN KEADILAN DAN DEMOKRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Willy Eichler adalah seorang ahli teori sosialisme demokrat modern yang melandasi perjuangan politik Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Teori-teori Williy Eichler itu termuat dalam sebuah buku kecil lagi sederhana yang sekarang kurang-lebih menjadi “buku pinter”-nya aktivis-aktivis SPD. Buku itu berjudul (dalam bahasa Inggris) *Fundamentals of Democratic Socialism* atau Dasar-dasar Sosialisme Demokratis. Meskipun asal mula partai tersebut adalah gerakan yang bertitik-tolak dari Marxisme, tetapi dalam perkembangan selanjutnya — sebagaimana dengan jelas sekali dibentangkan dalam buku kecil tadi — Marxisme tidak lagi dianut secara dogmatis dan statis, melainkan dikembangkan secara amat liberal dan dinamis. Sudah tentu dengan risiko bahwa mereka memperoleh cap sebagai bukan lagi sosialis apalagi Marxis oleh partai-partai dan orang-orang komunis.

Salah satu pokok yang menarik dalam teori Eichler itu ialah pemahamannya tentang demokrasi dan sosialisme atau keadilan sosial yang dinamis. Dalam pengertian dinamis itu ialah bahwa demokrasi serta keadilan sosial tidak dapat dirumuskan sekali jadi untuk selama-lamanya, tetapi nilai-nilai itu tumbuh sebagai proses yang berkepanjangan dan lestari tanpa putus-putusnya. Suatu masyarakat adalah demokratis selama di situ terdapat proses yang tak terputus bagi terselenggaranya sistem pergaulan antarmanusia yang semakin menghormati dan mengakui hak-hak

asasinya. Dan masyarakat itu sosialis atau berkeadilan sosial selama ia mengembangkan sistem ekonomi yang semakin luas dan merata penyebaran dan pemanfaatannya.

Tetapi, kata Eichler, pada analisis terakhir, baik demokrasi ataupun keadilan akan terwujud jika dalam masyarakat itu terdapat pemberian kesempatan yang sama untuk semua anggota atau warga. Salah satu kesempatan itu yang terpenting, karena paling luas dan kuat efeknya, ialah pendidikan. Maka sebelum yang lain-lain, dalam suatu masyarakat yang adil dan demokratis terlebih dahulu harus ada keadilan dan demokrasi dalam pendidikan. Tanpa dasar itu semua, usaha membangun demokrasi dan pendidikan akan bagaikan mendirikan istana pasir saja.

Bagaimana dengan negara kita? Jelas sekali bahwa cita-cita tentang demokrasi dan keadilan sosial itu merupakan faktor-faktor pendorong yang amat kuat bagi para perintis dan pejuang kemerdekaan dahulu. Nilai-nilai itu terumuskan dalam Pancasila. Salah satu yang dicita-citakan ialah demokrasi dan keadilan dalam hal pendidikan. Maka dari itu, menurut Mukadimah Undang-Undang Dasar, salah satu tujuan kemerdekaan ialah mencerdaskan seluruh rakyat. Pendidikan adalah hak asasi rakyat sepanjang konstitusi itu. Maka mengingkari hak itu adalah inkonstitusional, melanggar Undang-Undang Dasar.

Tetapi adalah suatu ironi bahwa dalam masa-masa kita hendak melaksanakan UUD 45 “secara murni dan konsekuen”, justru terdapat gejala di mana pendidikan cenderung untuk menjadi barang luks, mahal, dan semakin tak terjangkau oleh rakyat banyak. Di masa lalu (Orde Lama), konotasi kenaikan status sosial karena pendidikan (khususnya pendidikan tinggi) sudah amat berkurang, karena pendidikan itu terdapat dan tumbuh “seperti jamur di musim hujan”, sampai-sampai di kota-kota kecil juga terdapat perguruan tinggi. Memang dengan risiko bahwa mutu pendidikan itu merosot jauh di bawah standar, tetapi dengan keuntungan bahwa ia menjadi murah dalam arti semakin banyak orang yang menikmatinya. Kemerosotan mutu itulah yang antara lain merupakan alasan menu-

runkan jumlah perguruan (tinggi) dan memperketat perizinan atau pengakuannya. Mungkin sekali mutu tinggi yang dituju sekarang telah tercapai (tetapi juga mungkin belum), tetapi yang jelas ialah bahwa *supply* pendidikan tidak bisa lagi mengimbangi *demand* dalam masyarakat, sehingga menjadi mahal. [❖]